

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membahas perihal siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam olahraga, tentu yang dimaksudkan adalah laki-laki dan perempuan. Menoleh ke belakang, fakta menunjukkan bahwa telah lama olahraga dipandang sebagai milik atau aktivitas yang identik dengan kaum maskulin, sehingga keterlibatan perempuan dalam olahraga cenderung terbayangi oleh pandangan tersebut. Messner (1987) dalam Maguire *et al.* (2002) menyebutkan bahwa, olahraga menjadi suatu aktivitas yang didefinisikan sebagai pengalaman yang memvalidasi kemaskulinitasan. Pendapat yang senada disampaikan Burgess *et al.* (2003) bahwa, olahraga di masa sekarang sangat kental dengan ‘hegemonic masculinity’. Olahraga didefinisikan sebagai suatu kegiatan ekstrem yang diikuti dominasi fisik yang relatif besar. Pendapat yang telah disebutkan seperti telah menekankan hak paten seolah kaum laki-laki menjadi pemilik dari aktivitas olahraga, yang hakikatnya diakui dari segi jasmani dan rohaninya lebih kuat dan kekar untuk menjadi partisipan dalam bidang olahraga. Perempuan seakan-akan terpojokkan atau tersingkirkan dari kegiatan yang berhubungan dengan olahraga, berbanding terbalik dengan entitas olahraga yang seharusnya praktiknya menyodorkan kebebasan bagi siapa pun yang ingin turut terlibat di dalamnya.

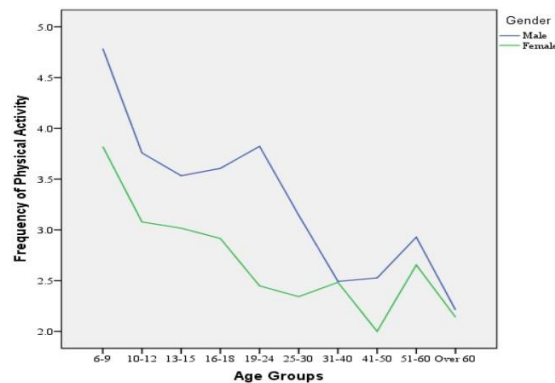
Saavedra (2005) mengungkapkan bahwa terdapat tiga klasifikasi masalah yang menjadi perhatian untuk dipelajari terkait partisipasi anak-anak perempuan dan perempuan dewasa dalam olahraga, yaitu: (1) *Safety*, (2) *Competing*

Obligations, dan (3) *Gender and Sexuality*. Sebenarnya, perempuan ikut berpartisipasi dalam olahraga didorong oleh adanya beberapa faktor di belakangnya. Cortis *et al.* (2007) menjabarkan penemuannya melalui laporan penelitiannya bahwa terdapat enam faktor yang mendorong partisipasi perempuan dalam olahraga, yaitu (1) kendala sosio-kultural (2) kendala akses (3) kendala afektif (4) kendala fisik (5) kendala sumber daya (6) kendala antarpribadi. Semua dependensi yang telah disebutkan, secara signifikan menjadi permasalahan bagi perempuan dalam keterlibatannya di bidang olahraga. Kenyamanan perempuan dalam berolahraga juga ditentukan oleh keenam faktor kendala tersebut. Lebih lanjut, Coakley (2001) menyatakan bahwa terdapat lima faktor utama yang dapat mendorong peningkatan partisipasi olahraga di kalangan anak perempuan dan perempuan dewasa, yaitu (1) peluang atau kesempatan baru; (2) undang-undang pemerintah tentang persamaan hak; (3) gerakan kesetaraan hak perempuan secara global; (4) perluasan gerakan kesehatan dan kebugaran; (5) peningkatan liputan media tentang perempuan dalam olahraga. Kelima faktor yang disebutkan oleh Coakley telah menunjukkan pengaruhnya dalam meningkatkan partisipasi anak-anak perempuan dan perempuan dewasa dalam dunia olahraga, dan menumbuhkan pemahaman mengenai kesetaraan gender dalam olahraga menjadi tujuan yang bermakna dan bermanfaat.

Selanjutnya, IOC (2017) melaporkan fakta mulai tahun 1970an terjadi kenaikan yang cukup signifikan terkait kesadaran dan pemahaman peran perempuan di dunia, termasuk wujud partisipasi perempuan dalam aktivitas olahraga yang terbilang kompetitif dan bergengsi. Keterlibatan atau partisipasi

perempuan dalam ranah publik, dalam hal ini termasuk olahraga menjadi tujuan untuk diupayakan peningkatannya seiring terjalannya perjanjian global mengenai kesetaraan gender yang tertuang dalam Konvensi PBB tentang peniadaan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks *Sustainable Development Goals*. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam olahraga termasuk rendah. Pengkajian dengan topik permasalahan mengenai partisipasi perempuan dalam olahraga dilakukan oleh Takako Lida dalam Fan Hong (2004) di 14 negara di benua Asia lebih rendah dibandingkan negara di benua Eropa dan Amerika, di mana partisipasi perempuan dalam olahraga di 14 negara benua Asia rata-ratanya hanya menyentuh angka 40%. Sementara itu, persentase partisipasi perempuan Asia hanya mencapai 35,9%, lebih rendah jika dibandingkan dengan partisipasi laki-laki yang mencapai angka 45,2%. Data dari IOC (2017) dan laporan hasil penelitian Takako menunjukkan bahwa terdapat tendensi peningkatan dalam partisipasi olahraga, tetapi keterlibatan perempuan masih jauh dari angka yang diharapkan.

Sebuah penelitian menemukan fakta yang menyebutkan tingkat partisipasi perempuan dalam latihan jasmani berada di angka 47%, sedangkan partisipasi laki-laki menyentuh angka 62% (Maksum & Indahwati, 2021). Terdapat disparitas sebanyak 15% di antara keduanya.



*Gambar 1 Grafik Partisipasi Berolahraga Ditinjau dari Usia dan Jenis Kelamin
(Sumber: Laporan Nasional Sport Development Index Tahun 2021)*

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi paling optimal berada pada kategori rentang usia 6-12 tahun dan semakin menurun ketika menginjak usia 19 tahun. Sementara itu, pola partisipasi laki-laki cenderung melonjak ketika menginjak rentang usia 50-80 tahun. Keadaan berbeda ditunjukkan dari pola partisipasi perempuan yang justru mengalami penurunan yang sangat ekstrem ketika menginjak usia 50 tahun (Maksum & Indahwati, 2021). Fakta secara universal menguak kenyataan yang senada, sebanyak 31% orang dewasa yang berusia 15 tahun ke atas berada pada golongan kurang aktif berolahraga, persentase laki-laki mencapai 28%, sementara persentase perempuannya mencapai 34% (World Health Organization, 2015).

Rendahnya partisipasi olahraga perempuan ditunjukkan dalam perhelatan Olimpiade Tokyo 2020, kontingen Indonesia mengirimkan sebanyak 28 atlet dan hanya ada 12 atlet perempuan saja. Selanjutnya, dikutip dari Human Rights Watch (2023), kurangnya partisipasi perempuan dalam olahraga juga disebabkan oleh adanya regulasi yang diterapkan secara internasional untuk digunakan sebagai bentuk pengawasan, yaitu aturan pengujian jenis kelamin. Pemberlakuan aturan ini membuat atlet perempuan dalam cabang olahraga atletik akan mendapatkan

pengawasan secara ketat yang didasarkan pada stereotip gender. Aturan ini dibuat oleh World Athletics, badan internasional yang mengatur tentang kompetisi atletik.

Adanya “Peraturan Kelayakan untuk Klasifikasi Perempuan” yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Maret 2023 ini membuat atlet perempuan yang memiliki kadar testosteron lebih tinggi dari perempuan pada umumnya dan didiagnosis variasi tertentu dalam perbedaan karakteristik jenis kelamin serta kepekaan hormonal, diharuskan mengikuti prosedur medis dalam rangka mengurangi kadar testosteron sampai pada titik 2,5 nanomole per liter dalam kurun waktu 24 bulan supaya bisa memenuhi kualifikasi dalam kompetisi dan diakui sebagai perempuan seutuhnya pada cabang atletik apa pun. Peraturan ini dinilai tidak berdasar pada studi ilmiah mana pun dan tidak mempunyai dasar objektif yang jelas. Hal ini jelas mengintervensi perempuan untuk menjalankan serangkaian kegiatan medis yang seharusnya tidak dibutuhkan dan terbukti dapat membahayakan atlet perempuan hanya demi memenuhi standar kualifikasi untuk bertanding. Perempuan yang dinilai “lebih maskulin” daripada perempuan pada umumnya berisiko untuk menjadi sasaran empuk sebagai bahan gosip yang berujung mereka harus mengakhiri karir atletiknya. Terbukti bahwa banyak penelitian yang menyatakan adanya standar feminitas yang diberlakukan bersifat sangat bias secara rasial. Padahal, tidak ada rujukan secara ilmiah yang menyatakan bahwa perempuan yang memiliki kadar hormon testosteron yang lebih tinggi akan lebih unggul dalam semua cabang olahraga. Secara fisik, beberapa atlet memiliki kondisi yang menguntungkan mereka, hal ini berkaitan dengan jenis kelamin, tetapi tidak semuanya selalu begitu. Meski laki-laki memiliki berbagai kadar testosteron,

nyatanya tidak pernah ada satu pun peraturan yang mengharuskan laki-laki untuk melakukan tindakan medis demi mencapai kadar testosteron tertentu sesuai laki-laki pada umumnya. Jelas, adanya peraturan ini menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia olahraga di mana perempuan harus mengikuti syarat-syarat tertentu agar sesuai kualifikasi, sementara laki-laki tidak.

Apa yang dilakukan oleh World Athletics jelas berbanding terbalik dengan berbagai peraturan dunia tentang hak asasi manusia untuk turut berpartisipasi dalam olahraga. *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 mengandung pesan tidak langsung yang membela hak manusia untuk turut serta menunjukkan partisipasinya dalam ranah olahraga yang tertuang pada pasal 24 (setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dan waktu luang) dan pasal 27 (hak secara bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan masyarakat). Lebih tegas, peraturan khusus yang menjelaskan perihal hak untuk berpartisipasi dalam olahraga dibuat pada tahun 1970 melalui *European Sport for All* tahun 1976 yang tertuang pada Pasal 1, “setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam olahraga.”

Kemudian, tahun 1978, Konferensi Umum UNESCO membuat deklarasi yang disebut sebagai *International Charter of Physical Education and Sport* di mana pasal kesatu berbunyi, “Praktik pendidikan jasmani dan olahraga merupakan hak mendasar bagi semua orang.” Selain itu, ada juga Brighton Declaration on Women and Sport yang menjadi perjanjian global yang pertama tentang Perempuan dan Olahraga, yang diselenggarakan di Brighton, UK, pada tahun 1994. Konferensi ini mengacu pada asas kesetaraan dan keadilan yang berbunyi, “(1) Kesetaraan kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam olahraga, apakah bertujuan

untuk rekreasi, promosi kesehatan atau performa tinggi, adalah hak setiap perempuan tanpa memperhatikan ras, warna kulit, bahasa, keyakinan, orientasi seksual, usia, status perkawinan, kecacatan, orientasi atau afiliasi politik, dan asal-usul bangsa atau sosial. (2) sumber daya, kuasa, dan tanggung jawab harus dialokasikan secara adil tanpa diskriminasi berbasis jenis kelamin.” Berbekal jaminan payung hukum di atas menjadi dorongan untuk mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dalam olahraga. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa titik berat perbaikan partisipasi perempuan dalam olahraga masih berada di level kesetaraan (*equality*), belum mencapai keadilan (*equity*). Dalam hal ini yang dimaksud kesetaraan adalah memperlakukan setiap manusia dengan cara yang sama, sementara keadilan berarti menyediakan kepada setiap manusia akses yang adil perihal apa yang disebut sebagai sumber daya sosial yang disesuaikan dengan hajat dan ketertarikan seseorang. Di dunia olahraga, kesetaraan dimaknai sebagai menyediakan garis *start* yang sama bagi semua orang, sementara keadilan dimaknai sebagai memberikan bantuan kepada semua orang untuk sampai pada garis *finish* yang sesuai bagi pribadi masing-masing. Dengan demikian, melalui pendekatan ini perempuan diharapkan telah terbebas dari belenggu standar yang diciptakan oleh sudut pandang laki-laki yang mengekang bahkan dalam ranah olahraga.

Di Indonesia, terdapat regulasi yang mengatur tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, di mana Bab IV menegaskan tentang Hak dan Kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara meliputi:

- Pasal 6, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a. Melakukan kegiatan olahraga; b. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c. Memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d. Memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan; e. Menjadi pelaku olahraga; dan f. Mengembangkan industri olahraga.
- Pasal 8, “Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.”

Peduli akan rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor olahraga, yang hanya menyentuh angka 30%, Women’s 10K menggandeng AIA Indonesia berkomitmen untuk turut berkontribusi menyediakan wadah bagi para perempuan untuk berolahraga tanpa adanya intervensi oleh kehadiran laki-laki. Melalui Women’s 10K, AIA Indonesia menyuarakan sekaligus mengajak perempuan untuk melek diri terhadap kesehatan dan potensi diri dalam dunia olahraga, dengan menyediakan informasi-informasi seputar manfaat olahraga lari dan menyelenggarakan program lari di beberapa kota yang dikhususkan untuk peserta perempuan. AIA Indonesia secara konsisten menyelenggarakan program lari tahunan yang merupakan agenda perayaan Hari Perempuan Sedunia (International Women’s Day) sejak tahun 2020 sebagai bentuk perwujudan misinya dalam upaya menciptakan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan yang sehat dan berdaya. Latar belakang digagasnya Women’s 10K ini lantaran masih banyak perempuan yang kurang percaya diri untuk mengikuti lomba lari. Jadi, hakikatnya hadirnya

Women's 10K untuk memfasilitasi perempuan agar berani mencoba hal baru yang aman untuk dilakukan tanpa adanya paksaan untuk berlomba. Selain itu, Dikutip dari Jakarta Post (2024), AIA Indonesia berkomitmen memberikan uluran tangan kepada jutaan keluarga di Indonesia dalam misi menciptakan hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik, dan perhelatan Women's 10K 2024 merupakan program yang dibuat sebagai sarana dalam mewujudkan visi tersebut, yang menciptakan ruang bagi perempuan untuk meningkatkan potensi dan kapasitasnya melalui olahraga lari. "Memberdayakan perempuan adalah fokus kami dalam mencapai tujuan keberlanjutan, dan kami berupaya untuk terus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga gaya hidup sehat. Kami berharap AIA Vitality Women's 10K menjadi ajang olahraga inklusif bagi perempuan Indonesia," ungkap Kathryn Parapak, Chief Marketing Officer AIA.

Sejalan dengan tren olahraga di Indonesia yang menunjukkan bahwa olahraga lari menempati posisi pertama sebagai olahraga yang paling diminati. Dikutip dari laman resmi Garmin (2024), dalam laporan 2023 Garmin Fitness Report dirilis data yang menunjukkan tren olahraga populer di Indonesia pada tahun 2023. Dari data yang terkumpul, olahraga lari, tenis, dan golf menjadi yang paling diminati oleh masyarakat yang cenderung kurang aktif secara fisik. Menurut Chandrawidhi Desideriani, Marketing Communication Manager Garmin Indonesia, olahraga lari mengalami lonjakan popularitas sebesar 79,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dikutip dari Bola.com (2023), Laila Munaf, Co-Founder dari SANA Studio dan Women's 10K mengungkapkan, "Women's 10K lebih dari gerakan lari untuk

perempuan ini adalah semangat untuk meningkatkan partisipasi dalam sektor olahraga.” Selanjutnya, Lia Merdekawaty, Head of Corporate Communication AIA menambahkan, “Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, kegiatan ini juga merupakan bentuk dari komitmen AIA untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui kegiatan *health and wellness* yang sejalan dengan fokus ESG (Environmental, Social, Governance) yang kami miliki.” Tahun 2024 ini, AIA Vitality Women’s 10K mengusung tema #RiseUpYourPlayground dan telah diselenggarakan pada tanggal 3 Maret 2024 di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Solo dipilih sebagai tempat pelaksanaan Women’s 10K 2024 ini karena menurut Laila, kota Solo merupakan tempat terbentuknya sejarah di mana perempuan diberdayakan dan Solo menjadi tempat untuk mengenalkan budaya yang berbeda dari ibu kota.

Pemberdayaan perempuan yang dimaksud oleh AIA Indonesia melalui Women’s 10K ini adalah memberikan pencerdasan dan kesadaran kepada perempuan melalui konten-konten edukatif terkait pentingnya berolahraga sekaligus mengajak perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam olahraga yang diselenggarakan oleh Women’s 10K. Dengan menyediakan akses dan fasilitas bagi perempuan, harapannya banyak perempuan yang tergugah rasa percaya dirinya dalam mengikuti lomba lari demi tercapainya perempuan yang berprestasi, sehat, dan terproteksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah dari fenomena yang diteliti, data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam berolahraga masih terbilang

rendah dan tidak seimbang antara partisipan laki-laki dengan partisipan perempuan. Dunia olahraga masih didominasi oleh laki-laki karena perempuan mengalami diskriminasi, sehingga membuat perempuan memiliki akses yang terbatas dalam dunia olahraga. Padahal, bidang olahraga merupakan bidang yang menjadi salah satu penunjang pembangunan negara di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lembaga internasional seperti PBB, IOC, WHO, UNDP, dan lembaga regional seperti Parlemen Eropa bahkan sudah mengakui peran dan kontribusi olahraga. Olahraga telah ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting yang menunjang adanya pembangunan dalam ranah kesehatan, kesejahteraan, penanaman nilai, pembangunan inklusivitas, manfaat ekonomi, dan relasi internasional.

Disebutkan dalam Resolusi PBB Nomor 58/5 di mana olahraga ditempatkan sebagai suatu agenda krusial untuk proses ekspansi dan rekonsiliasi (United Nations General Assembly, 2003). Baik olahraga maupun pendidikan jasmani berperan penting demi tercapainya tujuan MDGs/SDGs guna meningkatkan taraf hidup manusia agar tercipta kehidupan yang lebih baik, kemiskinan, penyakit, dan konflik dapat berkurang (United Nations, 2005). Secara lebih lanjut, PBB juga menyematkan arti penting olahraga dalam Agenda PBB 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, yang tertuang dalam paragraf 37, “Kami menyadari kontribusi yang tumbuh dari olahraga untuk mewujudkan pembangunan dan perdamaian dalam mempromosikan toleransi dan rasa hormat dan kontribusinya terhadap pemberdayaan perempuan, dan pemuda, individu, komunitas, serta untuk kesehatan, pendidikan dan tujuan inklusi sosial.”

Secara internasional, olahraga telah diakui sebagai bidang yang sangat berpengaruh dalam pembangunan dan perdamaian negara, yang tentunya mengedepankan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Indonesia sendiri juga telah memberlakukan peraturan atau regulasi mengenai sistem keolahragaan yang disuratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005. Dengan mengacu pada regulasi tersebut, seharusnya pelaksanaan keolahragaan di Indonesia tidak pandang bulu. Seharusnya kasus diskriminasi baik dari segi gender, ras, suku, agama, budaya, ekonomi, tidak lagi terjadi dalam dunia olahraga. Negara telah mengatur sedemikian rupa agar warga negaranya mendapatkan hak mereka secara penuh tanpa intimidasi dari pihak mana pun.

Berbagai regulasi perihal kesetaraan dan keadilan dalam dunia olahraga telah diamanatkan mulai dari regulasi secara regional, hingga internasional. Hal ini merupakan upaya perwujudan tanggung jawab dunia dan negara untuk memenuhi hak rakyatnya dengan tidak membedakan. Namun, amat sangat disayangkan karena praktiknya di lapangan justru berbanding terbalik. Partisipasi masyarakat dalam berolahraga hampir di seluruh dunia menunjukkan adanya ketimpangan gender antara partisipan laki-laki dengan partisipan perempuan. Perempuan masih menjadi sasaran diskriminasi dalam dunia olahraga, terlebih setelah munculnya peraturan yang dibuat oleh World Athletics, badan internasional yang mengatur tentang kompetisi atletik, yaitu “Peraturan Kelayakan untuk Klasifikasi Perempuan” yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Maret 2023 justru tidak merepresentasikan pesan-pesan yang dimuat dalam regulasi internasional maupun

regional tentang hak asasi manusia untuk turut berpartisipasi dalam olahraga, tidak terkecuali perempuan.

Olahraga juga memiliki arti penting bagi perempuan karena melalui olahraga, perempuan dapat diberdayakan. Sejalan dengan paradigma pembangunan olahraga yang mana berangkat dari konsep pembangunan melalui olahraga, pemberdayaan perempuan pun menjadi salah satu fokus di dalamnya. Konsep pembangunan melalui olahraga ini bermakna bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan olahraga itu sendiri, tetapi juga mengarah pada pencapaian tujuan secara luas sampai pada titik kesejahteraan masyarakat dan kualitas manusianya yang mencakup kesehatan dan kebugaran, budi pekerti dan integritas, sportivitas, disiplin dan berprestasi. Artinya, jika terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam olahraga, sehingga perempuan enggan untuk berpartisipasi aktif, maka perempuan tidak mencapai kesejahteraan karena perempuan dibatasi dalam upayanya meningkatkan kualitas diri untuk mendapatkan kesehatan dan kebugaran, budi pekerti dan integritas, sportivitas, disiplin dan berprestasi.

Melihat adanya kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi antara kondisi ideal dalam dunia olahraga yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan melalui berbagai regulasinya dengan rendahnya partisipasi perempuan, serta diskriminasi perempuan dalam dunia olahraga, sehingga perempuan kurang diberdayakan, Women's 10K bersamaan dengan AIA Indonesia mengadakan kampanye pemberdayaan perempuan yang berfokus pada kegiatan olahraga lari yang dikhususkan hanya untuk perempuan saja demi menyediakan wadah atau fasilitas bagi perempuan untuk berolahraga secara aman dan nyaman. Harapannya,

partisipasi perempuan dalam olahraga bisa lebih meningkat dan perempuan dapat merasa diberdayakan dengan turut serta dalam kegiatan Women's 10K. Dengan demikian, muncul pertanyaan penelitian, yaitu “Bagaimana pengalaman perempuan yang turut berpartisipasi dalam kegiatan Women's 10K oleh AIA Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami pengalaman perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan Women's 10K yang diselenggarakan oleh AIA Indonesia.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Teoritis

Dari sisi teoritis akademis, dengan adanya penelitian “Memahami Esensi Pengalaman Perempuan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Women's 10K oleh AIA Indonesia” diharapkan dapat menghadirkan sumbangsih dalam upaya elaborasi Ilmu Komunikasi, khususnya dalam wilayah Komunikasi Strategis perihal kampanye sosial yang berkaitan dengan komunikasi gender serta mampu menambah kajian khususnya mengenai keberadaan perempuan di ranah olahraga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan rujukan penelitian yang menggunakan *Standpoint Theory*.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian “Memahami Esensi Pengalaman Perempuan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Women's 10K oleh AIA Indonesia” dapat menjadi sumber informasi lain untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti

tentang pengalam perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga lari yang digagas oleh suatu organisasi atau lembaga. Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi bagi organisasi lain yang bergerak di bidang keolahragaan dalam upaya membangun partisipasi perempuan dalam berolahraga. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sosialisasi pemberdayaan perempuan dalam bidang olahraga oleh AIA Indonesia.

1.4.3 Signifikansi Sosial

Dari segi sosial, dengan adanya penelitian “Memahami Esensi Pengalaman Perempuan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Women’s 10K oleh AIA Indonesia” mampu memberikan sebuah gambaran untuk semua organisasi, lembaga, atau pemerintah mengenai upaya untuk mencerdaskan, memberdayakan, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam olahraga.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Paradigma Penelitian

Menurut Bogdan & Biklen (dalam Mackenzie & Knipe, 2006), paradigma merupakan sekumpulan dugaan, rencana, ide, persepsi atau proposisi yang saling terkait secara rasional yang memusatkan penalaran yang menjadi akar dalam melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, paradigma dijadikan sebagai dasar dalam memandang topik yang diteliti. Dalam penelitian “Memahami Esensi Pengalaman Perempuan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Women’s 10K oleh AIA Indonesia”, paradigma kritis menjadi paradigma yang dinilai paling relevan untuk digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melaksanakan penelitian.

Paradigma kritis didefinisikan sebagai pemikiran yang berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kesadaran kritis dalam masyarakat yang disertai dengan adanya aksi masyarakat itu sendiri dalam rangka memperbaiki keadaan (Sidharta *et al.* 2021). Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* menyebutkan bahwa pendidikan kritis mengupayakan untuk memberi kesempatan dan kebebasan kepada individu untuk menetapkan masa depannya sendiri. Pendidikan memiliki tiga komponen krusial, yang meliputi pengajar, peserta ajar, dan realitas yang bisa ditransformasikan menjadi fenomena penelitian, yaitu suatu hubungan atau relasi yang terjadi dalam suatu penyadaran kritis terhadap masyarakat (Freire, 2008).

Menurut Littlejohn, teori kritis mempunyai tiga karakter sebagai berikut: (1) terdapat usaha untuk mengerti pengalaman hidup individu dalam lingkup bahasan sosial; (2) adanya usaha untuk mendapati kecacatan atau kekeliruan pada sistem sosial yang berlaku di masyarakat, yang umumnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari; (3) adanya usaha yang dilakukan secara sadar untuk menggabungkan teori dengan aksi atau respons (Littlejohn *et al.* 2012). Selanjutnya, Littlejohn menyebutkan bahwa para pemikir kritis mengungkap kekuatan yang menjajah masyarakat melalui cara yang mampu menjadikan setiap individu berjaya dalam mempertanyakan konstruksi komunikasi setiap hari (Littlejohn & Foss, 2010).

Paradigma kritis mencakup semua teori sosial yang memiliki tujuan dan memiliki konsekuensi praktis yang berdampak. Selain melancarkan kritik kesewenang-wenangan dalam struktur yang dominan, yaitu struktur sosial kapitalisme, paradigma kritis juga yang berupaya mengadakan perubahan terhadap sistem atau struktur yang mendominasi tersebut menjadi sistem yang lebih adil.

Teori sosial kritis memiliki variasi seperti, feminisme, studi budaya (*cultural studies*), dan pascamodernitas, yang semuanya berangkat dari tiga asumsi dasar yang sama (Littlejohn, 1999). Tiga asumsi tersebut, yaitu:

- a. Menerapkan prinsip dasar interpretasi dalam ilmu sosial. Paradigma kritis memiliki orientasi untuk menafsirkan dan mengerti perihal kelompok sosial yang ditindas dan dipinggirkan.
- b. Mempelajari berbagai macam kondisi sosial guna menyingkap bermacam struktur yang belum terungkap dan tersembunyi. Teori kritis mengarahkan bahwa pengetahuan merupakan kekuatan yang digunakan dalam mendalami bagaimana individu atau kelompok ditindas, sehingga individu atau kelompok dapat memutuskan suatu tindakan untuk mengubah kekuatan penindas.
- c. Menyatukan teori dengan tindakan (praxis). Yang dimaksud “praxis” dalam hal ini adalah suatu konsep utama di dalam kerangka filsafat kritis. Habermas (dalam Hardiman, 1993) mengungkapkan bahwa praksis tidak hanya tentang reaksi naluriyah semata, melainkan tentang tindakan dasar manusia sebagai bagian integral dari eksistensinya sebagai bagian dari komunitas. Premis pokok ini berangkat dari pertimbangan tentang pengetahuan kolektif dan sejarah masyarakat bukan hanya berhenti pada kerangka konseptual semata, tetapi juga mengilhami tindakan untuk mencapai perubahan sosial yang lebih manusiawi dan mendidik. Fondasi konseptual ini dipertegas oleh Jurgen Habermas (1983) yang

mencetuskan teori tindakan komunikatif (*The Theory of Communication Action*).

Paradigma kritis menentang adanya konsep ketidakbiasan dan ketidakberpihakan dalam praktik ilmu sosial. Justru, paradigma kritis ini menginginkan, membawa, serta mengharuskan praktik subjektivitas, menunjukkan dukungan terhadap prinsip-prinsip yang menguntungkan kelompok tertentu, terutama kepentingan kelompok yang terpinggirkan, marginal, rentan, lemah, tidak berdaya, tertindas, dan minoritas, yang menunjukkan bahwa keberpihakan merupakan bagian dari naluri alamiah milik setiap individu sebagai manusia. Keadilan gender menjadi salah satu hal yang diperjuangkan oleh paradigma kritis.

Ketidakadilan gender ini ditandai dengan adanya praktik dominasi oleh kelompok penindas. Paradigma kritis yang diterapkan dalam penelitian ini didasarkan pada temuan atau fakta lapangan yang menunjukkan adanya ketidakadilan gender dari segi partisipan dalam aktivitas olahraga. Banyak penyelenggaraan pesta olahraga memberikan batasan-batasan kepada perempuan untuk ikut serta dalam olahraga. Kelompok penyelenggara diasumsikan sebagai kelompok penindas yang secara sadar atau tidak sadar menjadikan perempuan sebagai kelompok terpinggir dalam olahraga lantaran olahraga dianggap sebagai dunia maskulin. Oleh karena itu, paradigma kritis relevan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana memahami suatu kelompok dengan pengetahuan dan kekuasaannya dalam lembaga AIA Indonesia memberikan sosialisasi mengenai pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Women's 10K.

1.5.2 State of The Art

1.5.2.1 Konstruksi Sosial Atlet Perempuan dalam Mengikuti Olahraga Bela Diri Pencak Silat PSHT Rayon Martubung di Kelurahan Besar (Pinem & Rosramadhana, 2023)

Penelitian ini ditulis oleh Erika Br. Pinem dan Rosramadhana pada tahun 2023 dengan menerapkan pendekatan deskriptif dalam metode penelitian yang bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapat dari informan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan data tentang konstruksi sosial yang tumbuh dalam masyarakat terkait persepsi terhadap organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) terhadap atlet perempuan yang sejak lama telah menjadi baidan dari PSHT Rayon Martubung. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pandangan sosial yang menimpa para pesilat perempuan di PSHT Rayon Martubung mencakup lingkup internal dan eksternal. Konstruksi sosial lingkup internal menunjukkan bahwa masyarakat memandang perempuan yang berkecimpung di dunia pencak silat dianggap positif dan wajar, sementara masyarakat juga memberikan penghargaan kepada perempuan yang ikut serta dalam dunia persilatan.

1.5.2.2 Partisipasi Perempuan dalam Olahraga Perspektif Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman (Hasan, 2019)

Penelitian berikut ditulis oleh Rianto Hasan pada tahun 2019 dengan menerapkan pendekatan hermeneutika hadis menurut kajian Fazlur Rahman. Dari hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa Islam menegaskan bahwa olahraga bagi perempuan merupakan hal yang baik bagi mereka, bukan hanya sebatas rutinitas fisik biasa, tetapi juga ketika perempuan menjadikan olahraga sebagai bidang

pekerjaannya sebagaimana atlet perempuan yang memanfaatkan olahraga untuk mengembangkan dirinya (Hasan, 2019).

1.5.2.3 Analisis Perkembangan Wanita dalam Olahraga (Dermawan *et al.*, 2021)

Penelitian ini ditulis oleh Dikdik Fauzi Dermawan, Firmansyah Dlis, dan Dhika Bayu Mahardhika pada tahun 2019 menerapkan pendekatan deskriptif dalam metode penelitian yang bersifat kualitatif. Metode pengumpulan atau menghimpun data yang diaplikasikan yaitu *study literatur*. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan perempuan dalam dunia olahraga. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan mengalami peningkatan, sehingga perkembangan perempuan dalam aktivitas olahraga diharapkan dapat mencapai kesetaraan gender (Dermawan *et al.*, 2021).

1.5.2.4 Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Pada Wanita dalam Olahraga (Habali *et al.*, 2023)

Kajian berikut merupakan tulisan Venny Aulia Fasha Habali, Vicki Ahmad Kharisman, Gita Febria Friskawati, dan Dedi Supriadi pada tahun 2023 menerapkan pendekatan studi kasus (*case study*) dalam metode penelitian yang bersifat kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam kajian berikut, yaitu wawancara dan observasi. Teknik pengolahan data yang digunakan berupa klasifikasi data, presentasi data, dan validasi. Temuan penelitian ini adalah pandangan masyarakat secara umum diakumulasikan dan disimpulkan cenderung ke arah positif, menandakan persetujuan dan dukungan terhadap kesetaraan gender bagi perempuan di bidang olahraga. Namun, sisi lain dari masyarakat juga menilai perlu menciptakan apa yang disebut pembeda antara perempuan dan laki-laki dalam

aktivitas olahraga dari segi durasi, tingkat kekuatan, berat, dan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas fisiknya (Habali *et al.*, 2023).

1.5.3 Feminisme Liberal

Feminisme liberal merupakan paham feminisme yang menitikberatkan pada kebebasan individu dan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan. Aliran feminisme liberal berpendapat bahwa ketimpangan gender yang terjadi disebabkan karena konstruksi sosial yang membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik, termasuk ranah olahraga. Dengan mengupayakan adanya reformasi hukum, pendidikan, dan transformasi institusi sosial, feminisme liberal berupaya menciptakan akses yang setara bagi perempuan agar dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas, termasuk olahraga lari, tanpa hambatan yang berasal dari norma patriarki.

Menurut Wolff (2007) dalam Diva *et al.* (2024), feminisme liberal adalah aliran feminisme yang berfokus pada kesetaraan hak melalui reformasi institusi sosial seperti hukum, pendidikan, dan budaya. Aliran ini mengutamakan kebebasan individu, keadilan gender, dan kesempatan yang setara bagi perempuan di ruang publik, termasuk dalam olahraga. Dalam perspektif ini, perempuan harus bebas dari batasan sosial yang membatasi partisipasi mereka dalam aktivitas fisik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, seperti lari jarak jauh.

Dalam olahraga lari, partisipasi perempuan sering kali dipengaruhi oleh stereotip gender yang menganggap olahraga sebagai aktivitas maskulin. Feminisme liberal mendorong penghapusan hambatan ini melalui kampanye kesetaraan gender dan penguatan kapasitas perempuan. Misalnya, partisipasi perempuan dalam lomba

lari menjadi simbol penting perjuangan kesetaraan, karena olahraga ini mencerminkan kemampuan fisik, mental, dan keberanian individu tanpa memandang gender. Dukungan keluarga, kebijakan inklusif dalam penyelenggaraan acara, dan pengakuan terhadap prestasi perempuan dalam olahraga adalah langkah penting untuk meningkatkan jumlah peserta perempuan di bidang ini.

Olahraga lari menjadi simbol perjuangan feminisme liberal ketika perempuan mulai menantang larangan partisipasi mereka dalam acara lari jarak jauh, termasuk maraton, pada pertengahan abad ke-20. Upaya ini melawan stereotip medis dan sosial yang menyebutkan bahwa perempuan tidak mampu secara fisik untuk melakukan olahraga tersebut. Contohnya adalah Kathrine Switzer, yang menjadi perempuan pertama yang berpartisipasi dalam Boston Marathon pada tahun 1967 meskipun menghadapi perlawanan dari penyelenggara. Keberhasilan seperti ini tidak hanya membuka jalan bagi perempuan lain untuk terlibat dalam olahraga lari, tetapi juga mengukuhkan lari sebagai aktivitas yang memberdayakan secara fisik dan sosial (Schultz, 2014; McDonagh & Pappano, 2008).

1.5.4 Level Komunikasi

Fenomena yang menjadi fokus pada penelitian ini berada pada level komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merujuk pada interaksi komunikatif yang terjalin di setiap hubungan kerja sama interpersonal dan/atau antarkelompok yang terjalin di dalam institusi, lembaga, atau organisasi. Menurut Ruben (1998), terdapat persoalan krusial yang menjadi fokus dari komunikasi organisasi, yaitu peran

tanggung jawab lembaga, sistem hierarki dan tugas organisasi, kultur dan atmosfer organisasi, serta jaringan komunikasi.

Apabila organisasi dipandang sebagai sistem komunikasi yang kompleks, maka terdapat bermacam pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk kajian dalam konteks komunikasi, yaitu tradisi posisional, tradisi relasional, dan tradisi kultural (Littlejohn, 2002).

- a. Tradisi posisional, yaitu tradisi yang menitikberatkan kajian tentang bagaimana manajemen memanfaatkan jaringan formal dalam rangka menggapai tujuan organisasi/institusi.
- b. Tradisi relasional atau pendekatan hubungan, yaitu pendekatan yang fokusnya menekankan perihal cara individu menggapai tekad dengan menempuh proses interaksi.
- c. Tradisi kultural, yaitu tradisi ini memprioritaskan permasalahan mengenai bagaimana cara orang memupuk konstruksi realitas organisasional.

Dikutip dari Littlejohn (2014), Taylor menyatakan bahwa organisasi terbentuk saat dua individu berinteraksi, dengan saling memusatkan perhatian pada masalah atau fenomena yang sama. Proses berorganisasi yang demikian ini dijuluki sebagai *co-orientasi*, yaitu konsep yang menyebutkan bahwa dua individu memiliki ketertarikan pada suatu subjek bersama (subjek, permasalahan, keprihatinan, motif, kondisi, konsep, misi, orang lain, komunitas, dan lain sebagainya). Ketika membicarakan mengenai suatu masalah khusus, para peserta komunikasi yang terlibat menjajal untuk merundingkan tafsir atau pesan yang terkandung secara

tepat berkaitan dengan materi yang dibahas. Terkadang, para pelaku komunikasi berhasil melaksanakannya, tetapi terkadang tidak, dan memerlukan interaksi yang luas dalam rangka menemukan pemaknaan tertentu. Bagi Taylor, manusia daling terkait dalam apa yang disebutnya sebagai tritunggal A-B-X, A adalah orang 1, B adalah orang 2, dan X adalah masalah bersama atau materi yang menjadi sasaran atau pusat perhatian interaksi. Selanjutnya, Taylor juga menyebutkan bahwa berorganisasi didefinisikan sebagai suatu tahapan yang berulang, di mana interaksi dan pemaknaan saling mempengaruhi. Dapat dikatakan bahwa interaksi menciptakan pemaknaan bersama yang kemudian melahirkan interaksi (Littlejohn, 2014).

Komunikasi organisasi dikaji dari pandangan tradisi kritis berkaitan dengan budaya, lebih khususnya dengan hubungan dan ideologi yang lahir melalui interaksi organisasi. Dalam Littlejohn (2014), Dennis Mumby menegaskan bahwa satu dari sekian amanat utama dari pendekatan kritis adalah bahwa organisasi tidak saja menjadi kawasan yang independen guna menciptakan tafsir, melainkan juga merupakan hasil dan penghasil dari perjuangan antara kepentingan kelompok serta sistem pencitraan yang saling bersaing. “Wacana kecurigaan”, ialah istilah yang digagas oleh Mumby untuk menyebut pendekatan kritis yang mempertanyakan dan menguji struktur falsafah, otoritas, dan kontrol dalam organisasi.

Berkaitan dengan terbentuknya organisasi dari sisi tradisi kritis di mana organisasi lahir dari kumpulan orang-orang yang memiliki fokus yang sama terhadap satu masalah tertentu, sejalan dengan fenomena yang menjadi fokus dari penelitian ini. Anggota yang tergabung dalam AIA Indonesia yang melaksanakan

kegiatan Women's 10K ini memiliki ideologi yang sama dalam memaknai pemberdayaan perempuan di ranah olahraga. Hal yang demikian ini dapat dikaji melalui kacamata *Standpoint Theory*.

1.5.5 Teori

Teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah Teori Sudut Pandang (*Standpoint Theory*). Sandra Harding dan Nancy Hartsock melahirkan *standpoint theory* dalam buku mereka "*The Feminist Standpoint: Developing Ground for a Naturally Feminist Historical Materialism*". Teori sudut pandang membahas mengenai keterkaitan antara kekuasaan dengan pengetahuan. Teori ini terinspirasi dari teori perbudakan yang digagas oleh GW F. Hegel (1770-1831). Teori sudut pandang menyatakan bahwa terdapat beberapa perspektif yang tidak umum. Dengan demikian, perspektif dominan cenderung lebih bias, karena secara bersamaan bermaksud untuk mempertahankan status quo dan mengaburkan perspektif yang lebih lemah. Patricia Hill Collins (1989) dan Chela Sandoval menjelaskan bahwa *Standpoint Theory* digunakan sebagai cara untuk memberdayakan kelompok yang tertindas, menghargai pengalaman mereka, dan menunjukkan cara untuk mengembangkan "kesadaran oposisi."

Teori sudut pandang mempelajari realitas sosial melalui beberapa cara, di antaranya yaitu, melalui pemahaman perspektif, posisi, sudut pandang, atau pemikiran yang tertanam dalam diri seseorang (Littlejohn, 2011). Teori ini berpusat pada pengalaman individu yang dinilai mampu memberikan pengaruh terhadap perspektif dan sikap seseorang hari ini. Ditinjau dari perspektif gender, teori sudut

pandangan menjelaskan mengenai bagaimana pengalaman hidup perempuan di masa lalu mempengaruhi cara mereka berpikir.

Teori sudut pandang ini membahas bagaimana kehidupan manusia dapat mempengaruhi cara individu tersebut dalam menafsirkan dan membangun lingkungan sosial. Teori ini menganut pemahaman bahwa pengalaman tidak termasuk dalam kategori konteks sosial, norma atau tuntutan peran, atau konsepsi gender, melainkan pengalaman merupakan alat yang spesifik bagi perorangan dalam menciptakan suatu kondisi tertentu dan di mana pengalaman mereka terkandung di dalamnya.

Teori sudut pandang erat kaitannya dengan tingkatan persepsi yang ada pada level masyarakat, dan faktor yang paling determinan dalam memberikan pengaruh terhadap persepsi adalah pengalaman. Konsep inti dari teori sudut pandang adalah memahami perspektif kelompok marginal dalam masyarakat, khususnya perempuan. Pada dasarnya memang perspektif masing-masing individu memiliki perbedaan, tetapi akan ada kesamaan perspektif yang dimiliki oleh individu yang sama-sama berada di kelompok tertentu, di mana mereka saling berbagi lingkungan yang sama.

Standpoint Theory berfokus pada sudut pandang yang dapat dicapai perempuan dalam mendukung dan mempromosikan perempuan lain ketika ditempatkan dalam posisi terpinggirkan dalam masyarakat. Pengaplikasian dari teori ini dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat marginal. Sekelompok orang yang memiliki perspektif yang populer dapat mengevaluasi dan memahami dirinya sendiri, serta berusaha untuk mengupayakan hak-haknya, yang

berlanjut pada aksi berpartisipasi aktif untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Standpoint Theory berasumsi bahwa sebagian besar individu atau kelompok mungkin dianggap memiliki pandangan serupa, tetapi sebenarnya mereka dapat saja mempunyai perspektif yang beragam. Ketidaksamaan ini disebabkan oleh variasi pengalaman hidup, persepsi, pengajaran, dan keahlian atau ilmu yang dipengaruhi oleh kondisi sosial tempat mereka bertumbuh. Berikut adalah asumsi *Standpoint Theory* lainnya:

- Kehidupan material (atau kelas) menentukan dan menyekat pemahaman tentang hubungan komunal
- Pandangan dominan dari kelompok yang memiliki kekuasaan akan melahirkan dinamika hubungan di mana keseluruhan kelompok diharuskan untuk terlibat
- Pandangan yang lahir dari kelompok tertindas mencerminkan gerakan perjuangan yang mereka alami
- Pemahaman yang tertanam dan disepakati oleh kelompok inferior dan terpinggirkan mengenai ketidaksetaraan dalam dinamika antarkelompok akan menghasilkan suatu situasi yang lebih baik bagi dunia

Standpoint Theory dinilai relevan dengan konteks fenomena yang menjadi topik penelitian karena penelitian ini membahas mengenai pengalaman perempuan yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga lari bernama Women's 10K yang digagas oleh AIA Indonesia. Berangkat dari asumsi *Standpoint Theory* yang menyatakan bahwa sebagian besar individu atau kelompok mungkin dianggap

memiliki pandangan serupa, tetapi sebenarnya mereka dapat saja mempunyai perspektif yang beragam, sejalan dengan asumsi peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul “Memahami Esensi Pengalaman Perempuan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Women’s 10K oleh AIA Indonesia” bahwa perempuan yang menjadi peserta lari dalam kegiatan Women’s 10K oleh AIA Indonesia ini memiliki pemahaman dan pengalaman yang berbeda-beda antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya, dan masing-masing pengalaman memiliki keunikan tersendiri.

Selanjutnya, elaborasi mengenai relevansi penggunaan *Standpoint Theory* sebagai dasar penelitian lantaran adanya interaksi antara peserta lari dengan organisasi melalui kegiatan Women’s 10K ini. Teori ini akan menjadi dasar yang menjelaskan perihal temuan mengenai kegiatan lari yang digagas Women’s 10K nantinya benar-benar murni pemberdayaan perempuan atau terdapat unsur kapitalisme di dalamnya. Teori ini juga nantinya akan digunakan dalam menjelaskan interaksi antara peserta lari dengan organisasi, apakah nantinya ditemukan kesamaan antara pengalaman peserta lari dengan tujuan organisasi, atau justru ditemukan perbedaan.

1.6 Asumsi Penelitian

Penelitian ini berasumsi bahwa perempuan yang menjadi peserta lari dalam kegiatan Women’s 10K oleh AIA Indonesia ini memiliki pengalaman diberdayakan yang berbeda-beda antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya, dan masing-masing pengalaman memiliki keunikan tersendiri.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Pemahaman

Pemahaman menurut Sudaryono (2013) adalah “kemampuan seseorang untuk memaknai dari sesuatu hal yang dipelajari, dengan dibuktikan melalui bagaimana seseorang mampu menjabarkan inti dari teks atau mengubah informasi yang dipaparkan dalam satu format menjadi format yang lain”. Nana Sudjana (2004) juga menyampaikan pandangannya tentang definisi pemahaman di mana dirinya mengategorikan pemahaman ke dalam tiga tahapan, dimulai dengan pemahaman tahap terendah, yang melibatkan pemahaman harfiah. Tahap kedua adalah pemahaman interpretasi, di mana seseorang mampu mengaitkan informasi yang diterima dengan yang diketahui sebelumnya atau menghubungkan berbagai informasi. Tahap ketiga atau tingkat yang paling tinggi adalah pemahaman ekstrapolasi di mana individu mampu menemukan makna tersirat, merumuskan prediksi mengenai konsekuensi atau meluaskan pemahaman mereka dalam arti waktu, dimensi, situasi, ataupun hambatan.

Menurut Benjamin S. Bloom (2015), pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti secara mendalam sesuatu setelah hal tersebut dikenali, diingat, dan direkam dalam pikiran. Dapat dikatakan bahwa memahami suatu hal itu berarti seseorang mampu melihat dari berbagai sudut pandang. Seseorang dianggap telah memahami suatu hal jika individu mumpuni dalam menjabarkan atau menguraikan kandungan pesan dan maksudnya secara spesifik menggunakan susunan kata yang dirangkum sendiri.

Menurut Mahase Kapadia (2003), pemahaman tergolong menjadi dua kategori, yaitu:

a. Pemahaman (*instructional understanding*)

Pemahaman ini ditandai oleh pencapaian masyarakat pada kondisi mengetahui atau menghafal, tetapi masyarakat belum mengetahui latar belakang terjadinya suatu hal tersebut. Lebih lanjut, pada tahap pemahaman ini, masyarakat belum mengetahui atau belum mampu mengaplikasikan pemahamannya pada kondisi atau permasalahan yang masih memiliki keterkaitan.

b. Pemahaman relasional (*relation understanding*)

Pemahaman ini ditandai oleh pencapaian masyarakat yang telah mengetahui latar belakang hingga kronologi atau serangkaian hal yang saling berhubungan di dalamnya. Lebih lanjut, masyarakat telah mampu mengaplikasikan pemahamannya untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai situasi.

1.7.2 Pemberdayaan Perempuan

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk tindakan sosial dari anggota komunitas atau organisasi yang saling berkoordinasi untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan suatu tindakan kolektif demi terwujudnya penyelesaian tantangan sosial atau pemenuhan tuntutan sosial berdasarkan kapabilitas dan aset atau kekayaan yang dimiliki (Sumodiningrat, 1999). Secara umum, pemberdayaan merujuk pada kondisi atau pencapaian hasil dari adanya perubahan sosial, yang mencakup perwujudan masyarakat yang mandiri,

mempunyai wewenang dan wawasan, serta dapat memenuhi kebutuhan eksistensial seperti kebutuhan fisik, finansial dan sosialnya dalam hal ini adalah memiliki kepercayaan diri, berdaya dalam menyatakan suatu ambisi, memiliki pekerjaan, ikut terlibat dalam agenda sosial budaya, dan berdaya dalam melangsungkan tugas dan kewajiban hidupnya secara mandiri (Suharto, 2010).

Pemberdayaan perempuan secara khusus didefinisikan oleh Sulistiyani dari segi etimologis merupakan turunan dari kata “daya”, yang bermakna kapasitas atau kapabilitas. Dengan demikian, pemberdayaan diartikan serangkaian cara untuk memberdayakan diri, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, dan/atau memberikan daya, kapasitas dan kapabilitas dari pihak berdaya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004). Menurut Karl (dalam Prijono dan Pranarka, 1996), pemberdayaan perempuan didefinisikan sebagai serangkaian metode untuk menumbuhkan kesadaran dan membentuk kapasitas untuk meningkatkan partisipasi, kekuasaan, pengendalian, penentuan keputusan dalam skala luas, dan langkah perubahan supaya mencapai kesetaraan derajat dalam gender.

Dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (2024), pemberdayaan perempuan dimaknai sebagai rangkaian upaya yang dilaksanakan untuk memampukan perempuan dalam hal mendapatkan dan memudahkan akses pemeliharaan sumber daya, finansial, politik, sosial, dan budaya supaya perempuan mampu mengelola, menguasai diri, serta menumbuhkan dan memperbaiki kepercayaan dirinya, sehingga dapat mewujudkan peran dan partisipasinya ketika menghadapi permasalahan dengan logis. Dengan demikian, perempuan diharapkan

mampu membangun kecakapan, konsep, dan citra diri. Selanjutnya, dikutip dari pernyataan Miran (2010) dalam kajiannya yang berjudul “Segregasi dan Kemiskinan Perempuan dalam Secerach Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan”, disebutkan bahwa pencapaian dalam memberdayakan perempuan dapat tercermin melalui tiga tanda, yaitu:

- a. Keluaran (*output indicator*) adanya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan.
- b. Hasil (*income indicator*), yaitu melahirkan perempuan yang mana telah diberdayakan, sehingga sanggup menyokong ekonominya berdasarkan kemahiran yang dimilikinya.
- c. Dampak (*impact indicator*) terwujudnya perempuan yang mana telah diberdayakan, sehingga telah berhasil untuk hidup dengan layak, mampu meningkatkan usaha, menjalin organisasi, menjalin hubungan dengan masyarakat, dan membina sesama perempuan dalam rangka meningkatkan kemahiran atau kecakapan mereka.

Secara umum, pemberdayaan memiliki dua ciri, yaitu:

- a. Mencerminkan relevansi emansipatoris yang memotivasi masyarakat untuk turut andil dan berpartisipasi aktif secara kolektif dalam ranah Pembangunan.
- b. Melibatkan dan mengikutsertakan individu atau masyarakat ke dalam serangkaian usaha untuk memberikan pencerahan, penyadaran, dan pengorganisasian kolektif, sehingga individu atau masyarakat dapat turut berpartisipasi.

1.7.3 Kampanye

Kampanye secara harfiah didefinisikan sebagai rangkaian tindakan komunikasi yang terencana dan berkelanjutan untuk memengaruhi opini atau perilaku audiens dalam kurun waktu tertentu (Rogers & Storey, 1987). Kampanye, sebagai konsep, memiliki berbagai dimensi yang dapat dioperasionalkan tergantung pada konteksnya, seperti komunikasi politik, promosi kesehatan, pemberdayaan, atau pemasaran. Dimensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Target Audiens: pihak yang menjadi sasaran kampanye, baik individu, kelompok, atau masyarakat umum.
- b. Media yang Digunakan: sarana penyampaian pesan, seperti media sosial, iklan, atau tatap muka.
- c. Jenis Pesan: Isi pesan kampanye, misalnya informasi, persuasi, atau ajakan untuk bertindak.
- d. Tujuan: Perubahan yang diharapkan, seperti perubahan sikap, perilaku, atau kesadaran.
- e. Durasi dan Frekuensi: jangka waktu pelaksanaan kampanye dan seberapa sering pesan disampaikan.

1.7.4 Internalisasi Nilai

Internalisasi nilai secara sosiologis dalam prosesnya mengandung gagasan pemikiran, konsep, dan tindakan yang berasal dari eksternal kemudian dimasukkan ke dalam pikiran dari karakter individu. Sistem dan peristiwa yang lazim terjadi di level masyarakat, melahirkan pribadi yang ada pada diri seseorang, sehingga terjadi internalisasi (Scott, 1971).

Definisi internalisasi menurut Hornsby (1995) adalah sesuatu hal yang melekatkan pendirian, emosi, kepercayaan, dan lain sebagainya seluruhnya menjadi bagian dari karakteristik individu dengan mengintegrasikan pemikiran mereka melalui pengalamannya yang terus-menerus terjadi atau melalui perihal yang menerpanya. Pendapat senada juga disampaikan dengan Tafsir (2005), yang mendefinisikan internalisasi adalah tindakan untuk mengintegrasikan pengetahuan atau wawasan (*knowing*) dan keterampilan mengimplementasikan (*doing*) ke dalam kepribadian individu.

Hubungan kampanye dengan internalisasi nilai adalah kampanye seringkali menjadi alat untuk memfasilitasi internalisasi nilai dalam masyarakat. Misalnya, kampanye pemberdayaan perempuan dalam ranah olahraga, tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga mendorong perempuan untuk menginternalisasi nilai kesetaraan gender, kesehatan, dan gaya hidup rajin berolahraga. Dalam hal ini, kampanye berfungsi sebagai langkah awal untuk membangun kesadaran yang kemudian diharapkan berkembang menjadi internalisasi nilai pada individu atau kelompok. Namun, internalisasi nilai memerlukan waktu dan sering kali membutuhkan interaksi lebih dalam melalui pengalaman langsung atau pembelajaran pribadi, yang tidak selalu bisa dicapai hanya melalui kampanye. Oleh karena itu, meski keduanya berkaitan, kampanye dan internalisasi nilai tidak sepenuhnya sama.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian “Memahami Esensi Pengalaman Perempuan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Women’s 10K oleh AIA Indonesia”, merupakan penelitian kualitatif di mana bertujuan untuk memahami permasalahan manusia di dalam lingkungan sosialnya, dan menciptakan interpretasi yang kompleks dan menyeluruh. Melalui penelitian kualitatif dapat ditemukan makna, konsep, pengertian, karakteristik, dan gejala sosial. Penelitian ini bersifat fokus, alami, dan mengutamakan kualitas melalui berbagai cara yang kemudian dijabarkan secara naratif. Sederhananya, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban atas fenomena sosial dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan prosedur ilmiah.

Denzin dan Lincoln (2010) menekankan bahwa terdapat dua pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian naturalistik dan pendekatan interpretatif. Penelitian ini mengkaji sesuatu yang telah diatur secara alamiah, dan mencoba untuk menginterpretasikan suatu fenomena sosial yang memiliki makna akan hal tertentu. Metode penelitian kualitatif mempunyai beberapa karakteristik tertentu, yaitu menekankan wilayah yang bersifat natural, fleksibel, empiris, pengalaman konkret, proses, menyadari makna, totalitas, kedalaman, peran aktif partisipan, dan pemaknaan.

Penelitian yang berjudul “Memahami Esensi Pengalaman Perempuan Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Women’s 10K oleh AIA Indonesia” menggunakan desain penelitian fenomenologi kritis. Hegel mengartikan fenomenologi sebagai

‘pengetahuan sebagaimana nampak dalam kesadaran’. Yang dimaksud dengan pengetahuan dalam hal ini merupakan persepsi seseorang akan suatu hal, perasaan, dan pengetahuan mereka melalui kesadaran atau pengalamannya.

Pada dasarnya, fenomenologi merupakan gerakan pemikiran filsafat dan bukan suatu aliran filsafat. Fenomenologi memiliki artian upaya studi mengenai pengetahuan yang muncul karena rasa kesadaran untuk mencari tahu suatu hal. Yang menjadi objek pengetahuan dalam studi fenomenologi ini berbentuk indikasi, fenomena, atau insiden yang dimengerti dan dipelajari lewat pengetahuan praktis yang diterima secara sadar (*counscious experience*). Fenomenologi menilai bahwa pengetahuan praktis merupakan sumber acuan mengenai fakta yang ditelusuri.

Menurut Creswell (2014), fenomenologi diartikan sebagai sebuah ilmu yang mengandung nilai-nilai kesadaran dan nilai ideal dari objek ideal dari objek yang berkaitan dengan kesadaran. Sebagai suatu pemikiran filsafat yang mendalami pengalaman manusia melalui serangkaian cara yang logis, tersusun, runtut, kritis, tidak didasari oleh prasangka, dan tidak dogmatis. Penelitian fenomenologi membutuhkan pengkajian yang mendalam dan menyeluruh terkait kesadaran pengalaman manusia. Penelitian fenomenologi memiliki titik fokus utama yaitu makna. Makna menjadi hal krusial yang lahir dari interpretasi terhadap pengalaman manusia yang dilalui secara sadar. Dalam rangka mengidentifikasi kualitas yang inheren dari pengalaman kesadaran, perlu diselenggarakan secara komprehensif dan teliti (Smith *et al.*, 2009).

Dalam penelitian fenomenologi, tidak diperlukan sebuah hipotesa apa pun, tetapi praktiknya mengamati langsung untuk mengobservasi, dan kemudian

menguraikannya, bagaimana kenyataan secara apa adanya. Hal ini utamanya dilatarbelakangi keyakinan yang dimiliki para kalangan fenomenologis di mana pengalaman dinilai sebagai hal yang bersifat subjektif, bukan objektif (Creswell, 1994).

Stanley Deetz, salah satu tokoh yang mendukung pendekatan fenomenologi, dikutip oleh Littlejohn (2002), mengelompokkan pilar-pilar gerakan fenomenologi ke dalam tiga prinsip dasar, yaitu:

- a. Pengetahuan (*knowledge*) didapatkan langsung tanpa perantara dari suatu kesadaran praktis yang dilalui dengan penuh perhatian atau diniatkan. Artinya, wawasan bukan didapatkan dari (*is not inferred from*) kesadaran praktis (*experience*), tetapi dijumpai (*is found*) langsung tanpa perantara dari kesadaran praktis itu sendiri yang dilalui dengan kesadaran (*conscious experience*)
- b. Seseorang memaknai suatu hal pada dasarnya didasari oleh prospek dari pengetahuan praktis individu yang terkait dan terhubung dengan entitas atau sasaran yang bersangkutan. Artinya, makna dari suatu objek bergantung bagaimana hubungan yang terjalin antara seseorang dengan objek terkait.
- c. Bahasa menjadi medium yang menghantarkan definisi-definisi. Manusia menerima pengetahuan praktis mereka dengan menggunakan bahasa yang dijadikan sarana menginterpretasikan dan menampilkan pengalaman.

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kritis, peneliti mencoba untuk mempelajari realitas yang ada di lapangan perihal partisipasi perempuan dalam aktivitas olahraga yang dikonstruksikan sebagai suatu bidang milik kaum maskulin, yaitu laki-laki lantaran melanggengnya praktik budaya patriarki. Peneliti memandang realitas ini berdasarkan oleh sudut pandang objek yang diteliti, yaitu mempelajari, mengkaji, dan mendalami pemahaman dan pengalaman pelaksana sosialisasi pemberdayaan perempuan melalui kegiatan olahraga lari, dan bagaimana mereka memaknainya.

1.8.2 Subjek Penelitian

Penelitian “Memahami Esensi Pengalaman Perempuan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Women’s 10K Oleh AIA Indonesia” yang merupakan penelitian kualitatif menerapkan pendekatan pemilihan sampel dengan mendasarkan pada berbagai alasan dan konsiderasi khusus (*purposeful selection*) konsisten dengan objektif penelitian. Dengan demikian, metode pengambilan sampel penelitian kualitatif bersifat *purposive sampling* (Pawito, 2007). Subjek penelitian yang relevan dengan fenomena penelitian, yaitu peserta kegiatan Women’s 10K 2024.

1.8.3 Jenis Data dan Sumber Data

1.8.3.1 Data Primer

Dalam penelitian “Memahami Esensi Pengalaman Perempuan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Women’s 10K Oleh AIA Indonesia” memanfaatkan data primer, yaitu data yang berasal dari sumber aslinya (Sangadji E.M & Sopaih, 2010). Penelitian ini data primernya berpusat dan bersumber dari transkrip yang didapatkan langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian yang memenuhi

syarat, standar, ketentuan, atau kriteria yang telah ditetapkan, yaitu wanita berusia 18 tahun ke atas yang berpartisipasi menjadi peserta lari dalam kegiatan Women's 10K di Kota Solo pada bulan Maret tahun 2024.

1.8.3.2 Data Sekunder

Dalam penelitian “Memahami Esensi Pengalaman Perempuan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Women's 10K Oleh AIA Indonesia” memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari sumber-sumber luar yang tersedia atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain melalui media perantara (Indrianto & Supomo, 2013). Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal, artikel, buku, dan internet yang berkaitan dengan kegiatan Women's 10K.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian “Memahami Esensi Pengalaman Perempuan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Women's 10K Oleh AIA Indonesia” mengumpulkan data dengan menerapkan teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun kepada subjek penelitian. Teknik ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan data primer penelitian.

Terdapat 3 jenis wawancara yang meliputi percakapan informal, wawancara dengan memanfaatkan panduan (*interview guide*), dan wawancara terbuka dengan mengajukan pertanyaan standar yang tidak terbatas *open-ended standard* (Patton, 2002). Penelitian ini memanfaatkan teknik wawancara dengan menggunakan panduan (*interview guide*). Melalui teknik ini menghasilkan wawancara yang lebih mendalam dengan menitikberatkan pada berbagai persoalan inti dari minat penelitian. Pedoman wawancara berisikan pertanyaan yang mencakup garis besar

mengenai data atau informasi yang dibutuhkan, dan kemudian dapat dikembangkan berdasarkan perkembangan percakapan, konteks, dan kondisi interaksi selama wawancara berlangsung. Wawancara yang demikian dikenal dengan istilah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Lindlof (1995) mengemukakan bahwa melalui wawancara, peneliti dapat menggali berbagai materi atau perkara yang sulit dan terbatas jika ditelusuri dengan menggunakan teknik lainnya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data oleh Cresswell (2007) didefinisikan sebagai prosedur kontinu yang menuntut peninjauan data berkelanjutan, menyodorkan berbagai pertanyaan mendalam, dan merangkum catatan ringkas selama periode penelitian. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis fenomenologis yang mengaplikasikan proses analisis pada ungkapan-ungkapan penting, menggeneralisasi elemen-elemen makna, dan memperhatikan apa yang disebut Moustakas (1944) sebagai deskripsi inti.

Moustakas (1944) mengidentifikasi analisis fenomenologi ke dalam dua modifikasi, di mana salah satunya adalah modifikasi oleh Van Kaam yang menjelaskan tahapan analisis data pada penelitian fenomenologi adalah sebagai berikut:

1. Membuat daftar dan pengelompokkan awal: setiap daftar ekspresi berhubungan dengan pengalaman (*Horizontalization*)
2. Reduksi dan eliminasi (*Reduction and Elimination*): untuk menentukan konstituen invariant dengan menguji setiap ekspresi melalui dua persyaratan:

- a. Apakah ekspresi berisi suatu momen pengalaman yang termasuk konstituen yang perlu dan cukup untuk dipahami?
 - b. Apakah mungkin untuk mengabstraksi dan memberi label pada setiap ekspresi? Jika demikian, itu adalah horizon dari pengalaman. Ekspresi yang tidak memenuhi persyaratan di atas akan dihilangkan. Ekspresi yang tumpang tindih, berulang, dan samar juga akan dihilangkan atau disajikan dalam istilah deskriptif yang lebih tepat. Horizon yang tersisa adalah konstituen invarian dari pengalaman.
3. Pengelompokan dan penamaan konstituen invarian (*Clustering and Thematizing*): kelompokkan konstituen invarian dari pengalaman yang terkait menjadi label tematik. Konstituen yang dikelompokkan dan diberi label merupakan tema inti dari pengalaman tersebut.
4. Identifikasi akhir konstituen dan tema invarian melalui aplikasi: validasi (Validation)

 Periksa konstituen invarian dan tema yang menyertainya terhadap catatan lengkap atau transkripsi partisipan penelitian. (1) Apakah mereka diungkapkan secara eksplisit dalam transkripsi lengkap? (2) Apakah mereka kompatibel jika tidak diungkapkan secara eksplisit? (3) Jika mereka tidak eksplisit atau kompatibel, mereka tidak relevan dengan pengalaman peneliti dan harus dihapus.
5. Menggunakan konstituen dan tema invarian yang relevan dan tervalidasi, menyusun Deskripsi Tekstural Individual dari pengalaman untuk setiap

partisipan dan peneliti secara bersama. Sertakan contoh verbatim dari wawancara yang ditranskripsi.

6. Menyusun Deskripsi Struktural Individual dari pengalaman untuk setiap partisipan dan peneliti, berdasarkan Deskripsi Tekstural Individual dan Variasi Imajiner.
7. Menyusun deskripsi Tekstural-Struktural dari makna dan esensi pengalaman untuk setiap partisipan penelitian, dengan menggabungkan konstituen dan tema invarian.

Dari Deskripsi Tekstural-Struktural Individual, kemudian mengembangkan Deskripsi Komposit tentang makna dan esensi pengalaman, yang mewakili kelompok secara keseluruhan.

1.8.6 Goodness Criteria

Parameter kualitas penelitian dapat ditinjau dengan menilai paradigma sebagai landasan dan cara pandang yang diaplikasikan dalam suatu penelitian. Penelitian yang menerapkan paradigma kritis sangat memperhatikan *historical situadness*. Segala bentuk kemajuan atau progres ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, konteks politik ekonomi, dan kebudayaan mengambil porsi penting dan sukar untuk diabaikan. Perkembangan teknologi dan jaringan internet kian pesat menyebabkan sosial media, terutama Instagram semakin disenangi oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, kemudahan akses terhadap segala bentuk informasi, termasuk informasi mengenai penyelenggaraan aktivitas olahraga. Penelitian ini memperhatikan latar belakang historis perkembangan

bidang olahraga terkait partisipasi perempuan dan laki-laki yang terkesan masih terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan.

Women's 10K menjadi salah satu akun Instagram yang menyuarakan tentang pemberdayaan perempuan melalui aktivitas olahraga. Akun Instagram Women's 10K memiliki pengikut sebanyak 10,7 ribu dengan 582 unggahan yang berisi tentang edukasi pentingnya olahraga bagi perempuan serta ajakan untuk mengikuti olahraga lari yang dikhususkan untuk perempuan. Konteks historis akan dicantumkan dalam Bab II yang akan menjabarkan berbagai kegiatan Women's 10K sejak pertama kali kegiatan ini digagas, yaitu tahun 2020 dan bagaimana konsep pemberdayaan perempuan dalam kegiatan tersebut.